

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 204.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum.
- Bahder Johan Nasition, Metode Penelitian Ilmu Hukum,
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Buntoro, Kresno (2016), Konsep “Bagi-Beban” dalam Keamanan Maritim di Nusantara Indonesia, Jurnal Maritim Pusjiantara.
- C.C. Schmidt, (2005) dalam Ibid.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Tahun 2003.
- Dasar Kewenangan TNI-AL Dalam Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan Di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 200,
- HM Hidayat Nur Wahid, 24/03/2006, Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan, Seputar Indonesia, Jakarta.
- Lampiran Peraturan Kasal Nomor Perkasal /32/V/2009 Tanggal 14 Mei 2009.
- Lawrence M. Friedman, Amerika Law, An Introduction, PT Tata Nusantara, Jakarta, 2001,

Loebby Loqman, HAM dalam HAP, Jakarta, 2002,

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. Kedua puluh satu, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001,

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang.

P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2009.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Penyidik dan Dasar Hukumnya. TNI AL dan Penyidik lain sesuai Pasal 7 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.

Pius A. Partono dan M. Dahlan Al Barry, Karya Iliah Populer, Arkola, Surabaya, 1994,

Puslitbang-SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penelitian Hukum tentang Penegakan Hukum di Peraian Indonesia, 2013,

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan JO. Undang-Undang Nomor 24 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 66.

Robert Seidman, (*THE LAW OF THE NON TRANSFERABILITY OF LAW*).

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana,

Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang.

Schmidt, dalam Viktor P.H. Nikijuluw. Blue Water Crime, Dimensi Social Ekonomi Perikanan secara Illegal. Jakarta.

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta system Peradilan Pidana, UMM Press Universitas Muhamadiyah, Malang, 2004,

Siswanto Sunarso, 2005, Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeparman, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994,

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986),

Sumber data, Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Surachman dan Suhandi Cahaya, 222 Asas dan Prinsip Hukum Penyelenggaraan Negara, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010,

Viktor P.H Nikijuluw: Ibid.

William F.Glueck-Lawrence R. Jauch, 1991, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Erlangga, Jakarta.